

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agen (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan Teori keagenan (*agency theory*) sebagai hubungan antara agent dan prinsipal dimana pihak agent tersebut menerima tanggung jawab kekuasaan dari prinsipal. Teori keagenan dapat memotivasi agen untuk bertindak demi kepentingan pemilik atau prinsipal sesuai dengan hubungan kontraktual. Teori keagenan memperkenalkan relasi antara principal dan agen yang kemungkinan dapat menghasilkan asimetri informasi yang mengarah pada ketidakjelasan (Renyaaan, 2023). Teori Keagenan merupakan sebuah konsep yang muncul interaksi atau sebuah hubungan antara suatu pihak sebagai prinsipal dan pihak lain sebagai agen. Hubungan tersebut berkaitan dengan penyediaan jasa dari pihak agen sehingga prinsipal dikatakan sebagai “penyewa” akan mendelegasikan wewenang terhadap agen (Chilly Bella Tiara Sedek & Kusumawati, 2024).

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu corporate governance dan earning management. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak (Richter *et al.*, 2024).

Dalam konteks pengelolaan keuangan, terdapat hubungan keagenan antara kepentingan pemegang saham dan manajer maupun antara pemegang saham dan kreditur. Dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham manajer perusahaan memiliki kemungkinan membuat keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan, ketika membuat keputusan seorang manajer didukung oleh karyawan,

konflik ini di kenal dengan konflik keagenan (Renyaan, 2023). Kaitan teori keagenan dengan penelitian ini adalah Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan agen yang mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mempublikasikan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Rakyat yang berperan sebagai prinsipal yang menginginkan hasil kinerja keuangan pemerintah yang baik dari agen dan salah satu pencapaian tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Widajatun & Kristiastuti, 2020).

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah yang berguna untuk mengelola sumber keuangan yang terdapat pada daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan (Ramadhan *et al.*, 2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan dengan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Widajatun & Kristiastuti, 2020). Kesehatan kesehatan suatu wilayah dapat sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang baik; ini dapat membuat wilayah tersebut lebih kuat dan berdaya dibandingkan dengan wilayah lain. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah, intervensi antara pemerintah daerah dan pusat harus dilakukan, dan pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah kota dan daerah serta sumber daya manusia mereka. Selain itu, pemerintah daerah dapat menetapkan strategi pembangunan infrastruktur yang lebih fleksibel untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja

sama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka (Ramadhan *et al.*, 2022).

Kinerja keuangan dicerminkan atas pelaporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis guna dapat memberi gambaran kinerja keuangan. Umumnya ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bermanfaat guna mendapati tingkatan kesehatan struktur keuangan, serta tingkatan kemandirian daerah dengan mengamati kemampuan daerah didalam penggalan sumber pendapatan daerah dibandingkan atas kewajiban pemerintahan didalam pembiayaan perbelanjaan daerah (KHOTIMA, 2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menjamin kemampuan daerah dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar guna mempertahankan pelayanan yang diinginkan. Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu metrik kinerja yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah (Sofyan & Syaiful Akbar, 2024). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Berikut ini formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Kinerja keuangan pemerintah merupakan hasil kerja keras pemerintah dibidang keuangan dalam satu tahun periode akuntansi berjalan. Pencapaian yang telah diraih pemerintah meliputi belanja daerah atau penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat ke pemerintah. Kinerja keuangan sangat penting sebagai tolok ukur bagi pemerintah dalam mengelola

keuangannya. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, ada beberapa aspek yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah (Amin Insani *et al.*, 2023). Aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan leverage (Sari & Mustanda, 2019). Dalam penelitian ini faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu opini audit, ukuran pemerintah, dan leverage.

### **2.1.3 Opini Audit**

Opini Audit merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Opini audit dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah. Opini audit membantu pemakai laporan keuangan menilai keberlangsungan hidup bisnis, resiko investasi, dan kewajaran kegiatan operasi (Zahra *et al.*, 2024). Opini audit adalah pernyataan pendapat yang dibuat oleh seorang auditor saat menilai kesesuaian perjanjian laporan keuangan yang diauditnya. Salah satu cara stakeholder menilai kinerja perusahaan, khususnya kemampuan perusahaan untuk bertahan di masa depan, adalah dengan melihat opini audit. Opini audit sangat membantu pengguna laporan keuangan membuat keputusan. Investor yang ingin melakukan investasi harus memahami situasi keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya (Zahra *et al.*, 2024).

Pernyataan profesional yang dibuat oleh pihak berwenang sebagai hasil dari pemeriksaan keuangan pada laporan keuangan dikenal sebagai opini. Opini audit mempengaruhi tingkat kewajaran informasi, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Opini audit juga mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pelaporan keuangan. Orang akan lebih percaya pada cara pemerintah mengelola keuangan pemerintah daerah jika opini audit pemerintah daerah menjadi lebih baik. Ini karena mereka memiliki kemampuan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Zahra *et al.*, 2024).

Opini audit adalah hal yang ditemukan mengenai ketidakwajaran yang ada pada LKPD terhadap pelanggaran Undang-Undang dan pengendalian internal yang berlaku (Oktawiana & Handayani, 2024). Opini audit adalah pernyataan profesional oleh auditor terhadap laporan keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang tercantum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini audit juga diartikan sebagai pendapat yang memverifikasi benar atau tidaknya semua informasi yang ada pada laporan keuangan (Oktawiana & Handayani, 2024). Berdasarkan SPAP ada lima tingkatan opini audit sedangkan berdasarkan SPKN yang digunakan BPK dalam memeriksa LKPD ada 4 berupa Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebanyak 2 (Dua) kabupaten dan 2 (kota) wilayah di Sumatera Selatan gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun 2022. Berikut merupakan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dari TA 2018 s.d. 2022 terkait hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten/Kota Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Opini LKPD Kabupaten/Kota Sumatera Selatan**

NO.	INSTANSI	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Provinsi Sumatera Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
3.	kota Prabumulih	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-PSH
4.	Kota Lubuk Linggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kota Pagaralam	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
6.	Kabupaten Ogan Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
7.	Kabupaten Ogan komering Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP-PSH	WTP-PSH
8.	Kabupaten Ogan Komerling Ulu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-PSH
9.	Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Kabupaten Ogan Komerling Ulu timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	Kabupaten Muara Enim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-PSH
12.	Kabupaten Lahat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

13.	Kabupaten Musi Rawas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-PSH
14.	Kabupaten Musi Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
15.	Kabupaten Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	Kabupaten Empat Lawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-PSH
17.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	WTP	WTP	WDP	WTP-PSH	WTP-PSH
18.	Kabupaten Musi Rawas Utara	WTP	WTP	WTP	WTP-PSH	WTP-PSH

Opini wajar tanpa pengecualian adalah pendapat yang diberikan auditor tanpa suatu keberatan apapun atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Ini diberikan jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Opini wajar dengan pengecualian (WDP) adalah Pendapat yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan keuangan, akan tetapi keberatan tersebut tidak memengaruhi secara material atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen. Opini tidak wajar merupakan pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Hal ini dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar keuangan tersebut benar benar tidak layak. Auditor harus menyatakan opini tidak wajar setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam proses audit. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

#### **2.1.4 Ukuran Pemerintah**

Ukuran pemerintah adalah besaran modal operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya (Amin Insani *et al.*, 2023). Ukuran pemerintah yang besar bisa memberi akses yang mudah untuk aktivitas

operasionalnya sehingga mengefektifkan pemberian layanan ke masyarakat secara layak. Kemudahan di sektor operasional pun bisa melancarkan upaya untuk mendapat PAD demi memajukan daerah sebagai pembuktian atas kinerja yang meningkat. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, berarti kinerja keuangannya pun kian membaik (Manafe *et al.*, 2023). Berdasarkan informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai ukuran pemerintah daerah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah (Amin Insani *et al.*, 2023).

Ukuran pemerintah daerah menjadi variabel besar atau kecil suatu wilayah yang bisa terukur mempergunakan jumlah keseluruhan aktiva, jumlah karyawan, total penghasilan maupun tingkat produktivitas. Pemerintah daerah berukuran besar akan terdapat tekanan besar dalam mengungkap kinerja keuangannya. Atas dasar itulah, pemerintah daerah berukuran besar diharuskan untuk berkinerja lebih baik dibanding pemerintah daerah berukuran lebih kecil. Ukuran pemerintah yang besar bisa memberi akses yang mudah untuk aktivitas operasionalnya sehingga mengefektifkan pemberian layanan ke masyarakat secara layak. Kemudahan di sektor operasional pun bisa melancarkan upaya untuk mendapat PAD demi memajukan daerah sebagai pembuktian atas kinerja yang meningkat. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, berarti kinerja keuangannya pun kian membaik (Manafe *et al.*, 2023).

Ukuran pemerintah daerah dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, bahwa setiap Kota/Kabupaten memiliki jumlah penduduk dan anggaran yang berbeda. Sehingga semakin besar ukuran pemerintah dapat membantu operasi pemerintah daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah (Manafe *et al.*, 2023). Ukuran pemerintah dilihat dari total aset pada pemerintah daerah, aset yang besar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih besar juga kepada masyarakat. Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah tersebut. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya harus didukung oleh aset yang memadai (Sari & Mustanda, 2019). Menurut Ukuran pemerintah yang besar dapat memberikan aktivitas operasional pemerintahan di suatu wilayah yang dibarengi dengan meningkatnya kinerja

pemerintah daerah. Skala pemerintahan yang besar, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar juga dalam mengungkapkan kinerjanya, Yaitu sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln Total Aset}$$

Kesimpulannya bahwa Ukuran pemerintah daerah akan menentukan kemampuan sebuah daerah dalam mengelola wilayahnya dan menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan mempermudah melakukan berbagai kegiatan operasional didaerahnya. Ukuran pemerintah daerah yang semakin besar juga akan berdampak pada kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan daerahnya sehingga nantinya pelaksanaan anggaran daerah dapat ditingkatkan (Mahadewi & Indraswarawati, 2023).

### 2.1.5 Leverage

Leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal . Leverage adalah perbandingan antara utang dan modal. semakin besar leverage yang dimiliki oleh suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tersebut tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri dan membutuhkan dana dari pihak eksternal, sehingga terdapat ketergantungan terhadap pihak luar berkurang dan terlihat semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah (Chilly Bella Tiara Sedek & Kusumawati, 2024).

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

Leverage berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap. Leverage juga menggambarkan struktur modal yang dimiliki suatu perusahaan sehingga terlihat tingkat risiko tidak tertagihnya utang. Pemerintah daerah yang



memiliki leverage tinggi maka akan memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utama berasal dari pihak eksternal. Semakin tinggi leverage, semakin ketat kontrol kreditur kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan persetujuan kreditur, untuk meyakinkan kreditur bahwa pemerintah daerah dapat membayar dan menyelesaikan utangnya (Chilly Bella Tiara Sedek & Kusumawati, 2024).

Dalam sektor publik, rasio utang atau leverage sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan kreditor untuk mengukur kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk bagian setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini juga mengidentifikasi seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus mencari jalan untuk mengurangi utang.

Leverage adalah kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai proyeknya dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. leverage adalah hasil perbandingan utang dan modal. Yang mana leverage merupakan jumlah proporsi dari total hutang terhadap ekuitas. Semakin rendah leverage, semakin rendah pula ketergantungan terhadap entitas pada pihak luar. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dan mengalokasikan keuangannya dengan baik. Leverage dapat diukur dengan cara menggunakan debt to equity ratio (Amin Insani *et al.*, 2023).

Hitungan rasio leverage bagi pemerintah berperan vital bagi kreditor maupun calon kreditor selama menentukan keputusan dalam memberikan kredit. Rasio ini hendak dipergunakan kreditor untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan utang mereka. Debt to equity ratio (DER) atau rasio utang kepada modal berguna sebagai pengukur besar kecil aset milik daerah yang dibebani oleh utang dengan melakukan perbandingan total utang terhadap jumlah keseluruhan aktiva daerah. Hasil yang diperoleh akan kreditor gunakan untuk menentukan kapabilitas pemerintah daerah selama membayarkan utang mereka. Rasio ini memberi indikasi besar kecil utang yang membebani pemerintah daerah

itu. Semakin tingginya leverage, tentu bisa disebut kinerja keuangan daerah kian memburuk. Dengan begitu, daerah itu belum bisa mendanai operasional mereka sehingga masih memerlukan pinjaman dari pihak lain (Manafe *et al.*, 2023).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nyayu Miftahul Ilmiyyah , Evada Dewata , Sarikadarwati (2017)	Faktor– Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1: Opini Audit X2: Ukuran Legislatif X3: Intergovernmental Revenue X4: Size X5: Leverage X6: Klaster Kemampuan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel-variabel independen yaitu opini audit, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, size, leverage, dan klaster kemampuan keuangan daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan tingkat kemandirian daerah. Sedangkan secara parsial, variabel opini audit, ukuran legislatif, size, leverage, dan klaster kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				keuangan pemerintah daerah Sedangkan variabel intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2.	Rezi Oktawiana, Dian Fitria Handayani (2024)	Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Karakteristik Daerah terhadap ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera	Y: ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah X1: Opini Audit X2: Temuan Audit X3: Karakteristik Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit dan tindakan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD, sedangkan temuan audit dan umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD.
3	Dy Ilham Satria Heny Puspita Sari (2017)	Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage Dan Opini Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1: Wealth X2: Intergovernmental Revenue X3: Opini Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan dan leverage tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah Lhokseumawe, sedangkan pendapatan antar pemerintah dan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kota.

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Lhokseumawe)		
4	Sefhvira Chilly Bella Tiara Sedek, Eny Kusumawat (2024)	Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Temuan Audit Bpk, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1: Leverage X2: Tingkat Kekayaan Daerah X3: Tingkat Ketergantungan pada Pusat X4: Temuan Audit X5: Pendapatan Pajak Daerah	Hasil penelitian ini adalah variabel tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel leverage, tingkat kekayaan daerah, dan pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5	Made Ayu Mira Mahadewi, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati (2023)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Provinsi Bali	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1: Ukuran Pemerintah X2: Belanja Modal X3: Dana Perimbangan X4: PAD	Hasil penelitian tercermin bahwa semakin besarnya ukuran pemerintahan akan berdampak menurunnya kinerja keuangan. Belanja Modal tidak ada hubungannya dengan Keuangan Ukuran kinerja. Dana Perimbangan berhubungan negatif dengan Kinerja Keuangan. PAD tidak berpengaruh

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				langsung terhadap Kinerja Keuangan
6	Mujiarto, Sugeng Riyadi, Ali Sandy Mulya (2024)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Opini Audit Going Concern Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Z: Ukuran Perusahaan Sebagai Opini Audit Going Concern Y: Profitabilitas X1: Likuiditas X2: Leverage X3: Leverage	Hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap peringkat opini audit going concern. Namun, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap opini audit going concern.serta melakukan monitoring dan evaluasi
7	Yoga Wisnu Prayuda, Johan Arifin (2024)	Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1: Ukuran Pemerintah X2: Ukuran Legislatif X3: Tingkat Ketergantungan Pemda X4: Leverage X5: PAD X6: Indeks Pembangunan Manusia	penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah, leverage, pendapatan asli daerah, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8	Henny A. Manafe <sup>1</sup> , Simon Sia Niha <sup>2</sup> , Dewa Putu S. Putra (2022)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1: Ukuran Pemerintah X2: Leverage X3: Dana Perimbangan	Hasil yang didapat, seperti: 1) Ukuran pemerintah daerah berakibat positif dan cukup penting kepada kinerja keuangan pemerintah daerah; 2) Leverage berakibat positif dan cukup penting kepada kinerja keuangan pemerintah daerah; 3) Dana perimbangan berakibat positif dan cukup penting kepada kinerja keuangan pemerintah daerah; 4) Ukuran pemerintah daerah, leverage, dan dana perimbangan mempengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi kinerja keuangan pemerintah daerah.
9	Amin Insani, Sri Rahayu, Misni Erwati (2023)	Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1:PAD X2:Dana Perimbangan,	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			X3: Belanja Modal X4: Pertumbuhan Ekonomi X5: Opini Audit	dan variabel dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun untuk variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
10	Fatimah Az Zahrah, Muhammad Rafi Zaen, Salma Putri Mellinia (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X1: PAD X2: Opini Audit X3: Belanja Modal	Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, opini audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

*Sumber: Data diolah, 2024*

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Ruang lingkup penelitian ini adalah Opini Audit, Ukuran Pemerintah, dan Leverage serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Variabel analisisnya menggunakan variabel independen yaitu Opini Audit, Ukuran Pemerintah, dan Leverage dan variabel dependennya adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat divisualisasikan dalam bentuk skematis pada gambar 4.1

Kinerja keuangan pemerintah merupakan hasil kerja keras pemerintah dibidang keuangan dalam satu tahun periode akuntansi berjalan. Pencapaian yang telah diraih pemerintah meliputi belanja daerah atau penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat ke pemerintah. Kinerja keuangan sangat penting sebagai tolok ukur bagi pemerintah dalam mengelola keuangannya. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, ada beberapa aspek yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah (Amin Insani *et al.*, 2023). Aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan leverage (Sari & Mustanda, 2019). Dalam penelitian ini faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu opini audit, ukuran pemerintah, dan leverage.

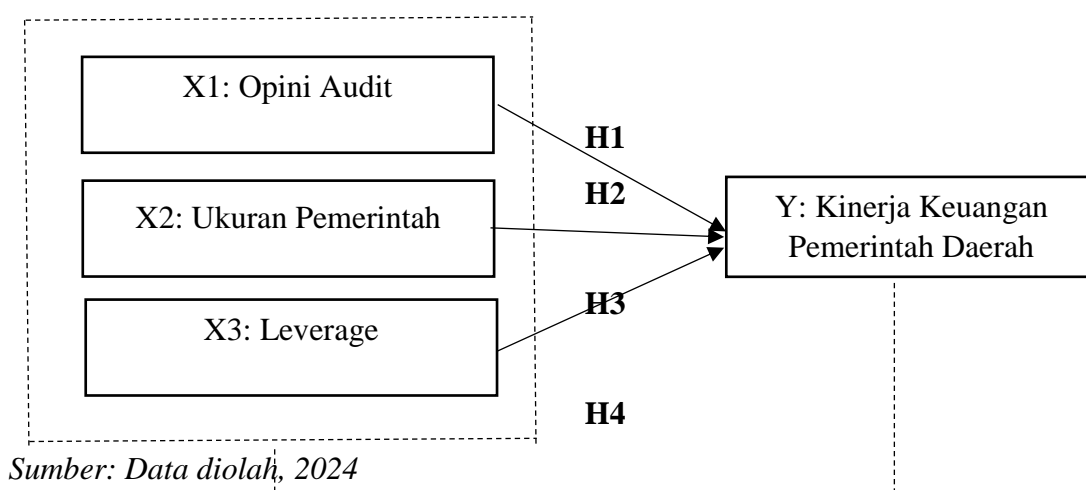
Opini audit adalah kesimpulan yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran informasi yang telah diaudit. Dalam praktik auditing, dikatakan wajar apabila informasi tersebut bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya (Amin Insani *et al.*, 2023). Semakin baik opini audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah (Satria & Sari, 2017).

Ukuran pemerintah (*Size*) adalah besaran modal operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya (Amin Insani *et al.*, 2023). Ukuran pemerintah yang besar bisa memberi akses yang mudah untuk aktivitas operasionalnya sehingga mengefektifkan pemberian layanan ke



masyarakat secara layak. Kemudahan di sektor operasional pun bisa melancarkan upaya untuk mendapat PAD demi memajukan daerah sebagai pembuktian atas kinerja yang meningkat. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, berarti kinerja keuangannya pun kian membaik (Manafe *et al.*, 2023). Semakin tinggi nilai ukuran pemerintah daerah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah (Amin Insani *et al.*, 2023).

Leverage adalah salah satu aspek yang juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dimana Semakin rendah leverage, semakin rendah pula ketergantungan terhadap entitas pada pihak luar. Sebaliknya, Semakin besar leverage yang dimiliki oleh suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk (Chilly Bella Tiara Sedek & Kusumawati, 2024)



**Gambar 2.1 Kerangka pemikiran**

**Keterangan:**

—→ : Pengaruh secara parsial

----- : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar 4.1 peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan Opini Audit, Ukuran Pemerintah, dan Leverage secara parsial maupun simultan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## 2.4 Hipotesis

Sugiyono (2021), Mengemukakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena baru didasarkan pada teori atas masalah yang dirumuskan. Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka ada 4 (empat) hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **2.4.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Opini audit adalah kesimpulan yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran informasi yang telah diaudit. Dalam praktik auditing, dikatakan wajar apabila informasi tersebut bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya (Amin Insani *et al.*, 2023). Penelitian Kusumasari dan Kartika (2022) memperoleh hasil bahwa Opini audit memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti Opini audit BPK mampu menjadi indikator untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Artinya, semakin baik opini audit BPK, maka semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan penelitian Rasyid *et al.*,(2022) yang memperoleh hasil bahwa adanya pengaruh negative antara opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat atau menurunnya opini audit yang diberikan oleh BPK, tidak selalu meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena masih ada masalah dalam pengelolaan

**H1:** Diduga Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **2.4.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah merupakan besaran modal operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya (Amin Insani *et al.*, 2023). Ukuran pemerintah yang besar bisa memberi akses yang mudah untuk aktivitas operasionalnya sehingga mengefektifkan pemberian layanan ke masyarakat secara layak. Kemudahan di sektor operasional pun bisa melancarkan upaya untuk mendapat PAD demi memajukan daerah sebagai pembuktian atas

kinerja yang meningkat. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, berarti kinerja keuangannya pun kian membaik (Manafe *et al.*, 2023). Riset yang dilaksanakan Aulia, R, & Rahmawaty, R. (2020), Ukuran pemerintah daerah berdampak positif ataupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian Oleh (Rahma Putri dan Amanah, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

**H2:** Diduga Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **2.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Leverage berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap. Leverage juga menggambarkan struktur modal yang dimiliki suatu perusahaan sehingga terlihat tingkat risiko tidak tertagihnya utang. Pemerintah daerah yang memiliki leverage tinggi maka akan memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utama berasal dari pihak eksternal. Semakin tinggi leverage, semakin ketat kontrol kreditur kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan persetujuan kreditur, untuk meyakinkan kreditur bahwa pemerintah daerah dapat membayar dan menyelesaikan utangnya (Chilly Bella Tiara Sedek & Kusumawati, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019), memberikan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, (Siregar, 2020) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**H3:** Diduga Leverage berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **4.4.4 Pengaruh Opini Audit, Ukuran Pemerintah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Opini audit adalah kesimpulan yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran informasi yang telah diaudit. Dalam praktik auditing, dikatakan wajar apabila informasi tersebut bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya (Amin Insani *et al.*, 2023). Semakin baik opini audit BPK, maka

semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah merupakan besaran modal operasional yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasionalnya (Amin Insani *et al.*, 2023). Ukuran pemerintah yang besar bisa memberi akses yang mudah untuk aktivitas operasionalnya sehingga mengefektifkan pemberian layanan ke masyarakat secara layak. Kemudahan di sektor operasional pun bisa melancarkan upaya untuk mendapat PAD demi memajukan daerah sebagai pembuktian atas kinerja yang meningkat. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, berarti kinerja keuangannya pun kian membaik (Manafe *et al.*, 2023). Leverage berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap. Pemerintah daerah yang memiliki leverage tinggi maka akan memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utama berasal dari pihak eksternal. Semakin tinggi leverage, semakin ketat kontrol kreditur kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan persetujuan kreditur, untuk meyakinkan kreditur bahwa pemerintah daerah dapat membayar dan menyelesaikan utangnya (Chilly Bella Tiara Sedek & Kusumawati, 2024).

Penelitian Kusumasari dan Kartika (2022) memperoleh hasil bahwa Opini audit memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan penelitian Rasyid *et al.*, (2022) yang memperoleh hasil bahwa adanya pengaruh negative antara opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, Riset yang dilaksanakan Aulia, R, & Rahmawaty, R. (2020), Ukuran pemerintah daerah berdampak positif ataupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian Oleh (Rahma Putri dan Amanah, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019), memberikan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, (Siregar, 2020) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**H4:** Diduga Opini Audit, Ukuran Pemerintah, dan Leverage berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.